

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Regulasi Dan Kebijakan Tentang Pembangunan Jalan

Adapun Regulasi tentang aspek pembangunan yang berkaitan dengan rencana pembangunan Jalan Tol Cisumdawu.

2.1.1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 1 poin 1 dijelaskan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang yang ada didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, rencana Jalan Tol Cisumdawu merupakan rencana proyek strategis selaras dengan peraturan tersebut.

2.1.2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004

Undang-undang ini berisi peraturan-peraturan yang membahas aspek tentang jalan yang merupakan undang-undang yang harus di tinjau dalam pembangunan jalan tol diantaranya pembangunan Jalan Tol Cisumdawu.

A. Penyelenggaraan Jalan Tol

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 43 ayat satu (1) tentang penyelenggaraan jalan tol dilakukan sebagai berikut :

- a. Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang.
- b. Menghasilkan guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- c. Meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan, dan.
- d. Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan

B. Syarat Pembangunan Jalan Tol

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dijelaskan pada Pasal 44 sebagai berikut :

1. Jalan tol sebagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas jalan alternatif.
2. Dalam keadaan tertentu jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif.
3. Jalan tol harus memiliki spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada.
4. Ketentuan lainnya jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat tiga diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.1.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 56 Tahun 2018

Dalam peraturan Presiden Republik Indonesia No 56 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dijelaskan bahwa pembangunan jalan tol cisumdawu masuk kedalam daftar proyek strategis nasional poin ke 15 dalam daftar tabel dari 64 proyek strategis nasional jalan tol yang ada dan harus dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan rencana strategis pembangunan yang berlaku.

2.1.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol pada pasal 12 dijelaskan bahwa rencana umum jaringan jalan tol disusun berdasarkan rencana umum tata ruang wilayah yang mengacu pada sistem transportasi nasional dan terintegrasi dengan rencana umum jaringan jalan nasional. Jalan tol ini terdiri dari ruas-ruas jalan tol yang berbentuk koridor dan mempunyai tahap pelaksanaan perencanaan meliputi : rencana jangka pendek, menengah dan panjang yang dapat dikaji ulang berdasarkan periode yang ada dan rencana pembangunan ini ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat yaitu menteri. Dalam tahapan pembangunan Tol Cisumdawu memiliki tujuan dan tahapan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

2.1.5 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pasal 11 poin ke 2 bahwa Tol Cisumdawu merupakan jalan bebas hambatan yang bertujuan untuk memperlancar pergerakan perekonomian daerah beserta mempercepat distribusi barang berupa alat logistik, komoditas pertanian dan hasil produksi beserta meningkatkan mata pencaharian guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

2.2 Pengertian Tutupan Lahan dan Penggunaan Lahan

Perubahan penggunaan lahan dan penutupan lahan pada umumnya dapat diamati dengan menggunakan data spasial dari peta penggunaan lahan dan penutupan lahan dari titik tahun yang berbeda. Data penginderaan jauh seperti citra satelit, radar, dan foto udara sangat berguna dalam pengamatan perubahan penggunaan lahan (Siyasi Sulthan, V. 2018). Sedangkan menurut (Dwiprabowo, H., Djaenudin, D., Alviya, I., Wicaksono, D., & Rahayu, I. Y. 2014). Bahwa terdapat perbedaan istilah tutupan lahan dan guna lahan tutupan lahan adalah atribut biofisik dari permukaan bumi pada suatu wilayah (seperti rumput, tanaman, bangunan) sedangkan penggunaan lahan adalah pemanfaatan lahan yang aktual oleh manusia (misalnya padang rumput untuk penggembalaan ternak, wilayah untuk perumahan). Sedangkan Dewi (2011) menyatakan bahwa istilah tutupan lahan lebih mengacu pada tipe vegetasi yang ada pada lahan tertentu, sementara penggunaan lahan mengacu kepada aktivitas manusia pada lahan tersebut. Selanjutnya sistem penggunaan lahan adalah penggabungan keduanya termasuk siklus perubahan vegetasi dan aktivitas pengelolaan (penanaman, pemanenan). Istilah penggunaan lahan sering digunakan untuk tujuan formal tertentu seperti pada bidang pertanian dan perkebunan yang dinyatakan dalam bentuk luas areal penanaman dan pemanenan Kerangka Konsep Dan Metodologi 19 (produksi) komoditas tertentu. Sedangkan dalam bidang kehutanan dikenal istilah kawasan hutan sebagai bentuk penggunaan lahan, meskipun dalam kenyataannya tidak seluruhnya merupakan tutupan hutan (berhutan). Dalam buku ini khusus untuk pemodelan dinamika tutupan lahan digunakan data yang diperoleh dari analisis citra satelit (satellite imagery) dari pengambilan selama beberapa tahun pada periodeperiode tertentu, sementara untuk menggambarkan

penggunaan lahan digunakan data statistik time-series dari Biro Pusat Statistik (Pusat dan Provinsi) dan sumber lainnya. Data citra satelit dan data statistik untuk tujuan studi digunakan secara terintegrasi untuk saling melengkapi.

Tutupan lahan merupakan hamparan material fisik permukaan bumi. Tutupan lahan dapat menggambarkan keterkaitan antara proses secara alami dan proses karena adanya faktor sosial. Tutupan lahan juga dapat menyajikan data informasi yang sangat penting untuk keperluan pemodelan serta untuk memahami fenomena alam yang terjadi di permukaan bumi pada tahun tertentu (Prasetyo, L.B. & Y. Setiawan. 2006). Peta tutupan lahan dapat digunakan dalam mempelajari perubahan iklim dan memahami keterkaitan antara perilaku manusia dalam pemanfaatan lahan dan perubahan global (Running, 2008; Gong, 2013; Jia, 2014). Informasi data tutupan lahan terbaru berupa peta dapat diperoleh melalui teknik penginderaan jauh atau melalui survey langsung maupun dari instansi penyedia data terkait. Penginderaan jauh telah lama menjadi sarana yang penting dan efektif dalam pemantauan tutupan lahan dengan kemampuannya menyediakan informasi mengenai keragaman spasial di permukaan bumi dengan cepat, luas, tepat, serta mudah. (Hansen et al., 2000; Liu et al., 2003; Thenkabail et al., 2009; Gong et al., 2013). Sumber data penginderaan jauh merupakan faktor penting dalam keberhasilan klasifikasi tutupan lahan (Jia, dkk, 2014). Data satelit Landsat biasanya digunakan dalam penginderaan jauh untuk klasifikasi tutupan lahan (Gumma, dkk, 2011; Gong, 2013), dengan demikian peta tutupan lahan terbaru dapat diperoleh dengan mudah. Berdasarkan pembaharuan data-data, informasi yang diperoleh melalui penginderaan jauh dinilai sangat baik dibandingkan dengan informasi dari instansi pemerintah yang terkait. Melalui pengindraan jauh, data satelit yang digunakan dapat berupa data hasil perekaman terbaru. Sedangkan menurut Yekti, A., Sudarsono, B., & Subiyanto, S. (2013) Perhitungan luas tutupan lahan dilakukan dengan sederhana yaitu menggunakan Calculate Geometry pada tabel atribut setiap kelas tutupan lahan, hasil yang didapat pertama kali dalam satuan meter persegi kemudian diubah menjadi hektar dengan Field Calculator yang nantinya akan dilakukan pada penghitungan tutupan lahan di Kecamatan Rancakalong.

2.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Guna Lahan

Perubahan guna lahan pada dasarnya merupakan gejala yang normal sesuai dengan proses perkembangan dan pengembangan kota dengan adanya perkembangan pembangunan perkotaan maka akan timbul perkembangan pembangunan terhadap daerah-daerah disekitarnya. Perkotaan (urban) merupakan wilayah yang memiliki kegiatan usaha utama non-pertanian, sedangkan di pedesaan (rural) merupakan wilayah yang memiliki kegiatan usaha utama pertanian. Perubahan guna lahan sering terjadi di daerah perkotaan maupun di wilayah sekitaran kota karena di pengaruhi oleh pembangunan dan pertumbuhan penduduk. Menurut (Pontoh dan Sudrajat ,2005),perubahan penggunaan lahan di wilayah sekitar kota dipengaruhi oleh :

1. Kepentingan Kota, yaitu meningkatnya kebutuhan lahan kota sehingga wilayah sekitar kota menjadi potensial dan penggunaan lahan yang ada mulai bergeser.
2. Lima Posisi strategis serta dinamika kota menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha untuk membeli dan mengembangkan lahan di perkotaan.

Penggunaan Lahan di wilayah tersebut mulai direncanakan untuk pembangunan sehingga terjadi alih fungsi lahan. Hukum ekonomi pasar menjelaskan proses alih fungsi lahan yang berlangsung dari aktivitas dengan land rent yang lebih rendah ke aktivitas dengan land rent yang lebih tinggi dimana land rent merupakan nilai keuntungan bersih dari aktivitas pemanfaatan lahan per satuan luas lahan dan waktu tertentu (Arsyad dan Rustiadi, 2008). Sedangkan menurut Sriwati, M. (2014) Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana merupakan gejala umum yang terjadi pada suatu kawasan atau daerah. Penggunaan lahan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekologi, dapat dilihat dari lahan yang semulanya merupakan rawa-rawa, sawah, kawasan penampung air hujan, daerah resapan air hujan dan lainnya di ubah, yang diubah menjadi kawasan permukiman, pertokoan, industri dan lain sebagainya dengan tidak mempertimbangkan kemampuan sistem kota.

2.3 Keterkaitan Lahan dan Transfortasi

Dengan adanya jalur transfortasi tentu perlu adanya lahan untuk mendirikan bangunan berupa jalan dan sarana lainnya untuk menunjang mobilitas dan

pergerakan masyarakat dari tempat satu ke tempat lainnya. Menurut Pontoh, N. K., & Sudrajat, D. J. (2005). Interaksi antara tata guna lahan dan transportasi begitu dinamis, hal ini dicerminkan dengan selalu berubahnya pola tata guna lahan dan jaringan transportasi perkotaan. Perubahan pola perjalanan, volume perjalanan dan pemilihan moda perjalanan merupakan fungsi dari pola pembagian tata guna lahan dalam konteks perkotaan. Sebaliknya, perubahan dari pola tata guna lahan berkaitan erat dengan tingkat aksesibilitas yang diberikan oleh sistem transportasi untuk menunjang mobilitas dari suatu area menuju area lain.

2.4 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan salah satu cara dalam pemetaan salah satunya dengan menggunakan metode tumpang susun /*overlay* terhadap parameter-parameter yang ditentukan seperti : kemiringan lereng, ketinggian lahan, tekstur tanah, curah hujan, penggunaan lahan dan kerapatan sungai (Darmawan, K., dan Suprayogi, A, 2017). Adapaun jenis dari analisis spasial diantaranya sebagai berikut :

1. Overlay

Overlay adalah bagian penting dari analisis spasial dan dapat menyatukan beberapa unsur data spasial menjadi unsur data spasial yang baru. *Overlay* dapat diartikan sebagai operasi spasial yang menggabungkan layer geografik yang berbeda untuk mendapatkan informasi baru. *Overlay* dapat dilakukan pada data vektor maupun raster. Menurut Putra, R. R. (2016) Dengan menggunakan teknologi SIG, pemetaan tata guna lahan dapat dianalisis dengan melakukan *overlay* pada data citra satelit dan kemudian dilakukan penggambaran peta tata guna lahan dari penggambaran tersebut dapat diperoleh luas perubahan.

2. Unsur-Unsur Spasial

a. Union, Merge, atau Combine

Pada pengolahan data SIG, seringkali harus melakukan penggabungan antar unsur-unsur spasial. Penggabungan tersebut dapat menggunakan analisis spasial, yaitu *union*, *merge*, atau *combine*. Penggabungan ini dapat menjadikan beberapa unsur spasial menjadi satu unsur spasial saja tanpa mengubah beberapa unsur spasial yang digabungkan tersebut. *Union* yaitu menggabungkan fitur dari sebuah

tema input dengan poligon dari tema overlay untuk menghasilkan output yang mengandung tingkatan atau kelas atribut (Hidayat, 2013).

b. Dissolve

Dissolve yaitu proses untuk menghilangkan batas antara poligon yang mempunyai data atribut yang identik atau sama dalam poligon yang berbeda (Hidayat, 2013).

2.5 Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Masyarakat

Dampak dari pembangunan jalan tol adalah semakin mudahnya akses transportasi antar daerah, sehingga aktifitas bisnis berjalan dengan lancar. Dampak keuntungan ikutannya adalah terbukanya lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat (Sumaryoto, S. 2010). Seiring dibangunnya jalan tol maka lokasi-lokasi dekat pintu keluar-masuk jalan tol akan berkembang cepat sebagai kawasan bisnis, baik industri, perdagangan, jasa keuangan dan perbankan dan sebagainya. Banyak bukti yang menunjukkan jalan tol turut memajukan ekonomi daerah dan mempersibuk kegiatan bisnis, terbukanya lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat bahkan transaksi sosial. Seperti yang terjadi di Bandung pasca beroperasinya jalan tol Cipularang. Sebelum jalan tol ini beroperasi, di mana perjalanan tercepat dari Jakarta ke Bandung memerlukan waktu 3 jam, Bandung belumlah semetropolis sekarang. Tetapi sekarang kota ini menjadi lebih sibuk, lebih banyak gedung menjulang, dan dikerumuni sentra-sentra bisnis seperti halnya Jakarta. Situasi yang sama juga terlihat di Madura, setelah jembatan tol Suramadu beroperasi (sumaryoto, 2010).

2.6 Sosial Ekonomi Masyarakat

Sosial ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam suatu rangkaian strata yang tersusun secara hierarkhis yang merupakan kesatuan tertimbang dalam hal yang menjadi nilai dalam masyarakat yang biasanya dikenal sebagai privilese berupa Kekayaan, serta pendapatan, dan prestise berupa status, gaya hidup dan kekuasaan (Yulisanti, 2000). Proses sosial terjadi secara terus menerus dalam kehidupan masyarakat, berkaitan dengan pergeseran fungsi sistem dan struktur

sosial sehingga mengubah pola perilaku anggota masyarakat. Sedangkan dampak sosial ekonomi suatu proyek di suatu daerah pada dasarnya ditentukan oleh karakteristik aktivitas proyek yang bersangkutan, karakteristik fisik dan kehidupan sosial ekonomi daerah di sekitar. Memperhatikan bahwa keadaan sosial ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lain berbeda-beda, maka dampak yang terjadi pada komponen-komponen tersebut juga berbeda-beda (Mantra, 2003). Perubahan penggunaan lahan menjadi pemicu timbulnya perubahan sosial ekonomi masyarakat dengan berubahnya pola adaptasi dalam memenuhi kebutuhan hidup di dalam sosial bermasyarakat.

Masyarakat di perkotaan umumnya telah memiliki konsep perkonomian yang baik dan memadai. Hal ini terwujud karena di perkotaan telah memiliki fasilitas,serta sarana dan prasarana yang mendukung proses berjalannya suatu aktifitas perekonomian masyarakat perkotaan. Kestabilan ekonomi di daerah perkotaan sangat di pengaruhi oleh kreatifitas masyarakatnya, utamanya adalah pemerintah yang berperan dalam memberikan kebijakan, serta masyarakat sebagai pelaku sektor ekonomi.

Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat kota telah terbagi kedalam berbagai profesi, heterogen yakni di mulai dari pemerintah, pegawai negeri, pegawai swasta, buruh,petani serta para pekerja di bidang tertentu lainnya. Di kota di kenal berbagai instansi serta sarana umum yang berperan aktif dlaam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota, yakni seperti perbankan, koperasi, pegadaian pasar,mall, dan lain-lain. Berdasarkan uraian tersebut, maka asebenarnya kota telah memilki kesejahteraan ekonomi yang baik walaupun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang tinggal di kota dan tergolong miskin. Namun jika dirata-ratakan secara umum, maka kota telah berhasil membangun fasilitas ekonommi dengan baik (Anwar. 2002).

2.7 Perubahan Mata Pencaharian Akibat Kondisi Lahan Berubah

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi berbasis lahan maupun non lahan sebagai suatu cara untuk mendorong kualitas hidup beserta ekonomi masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan pokok sehari-hari. Sementara itu dengan adanya alih fungsi lahan atau tutupan lahan dapat berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar (Muhamad Sofyan, I. 2013).

Mata pencaharian merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi) dengan cara bekerja. Mata pencaharian masyarakat berbeda satu sama lain. Perbedaan itu diantaranya dapat disebabkan oleh keadaan geografis, sosial, maupun corak budaya masyarakat setempat disamping kemampuan (skill) yang dimiliki. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap corak mata pencaharian suatu masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini disebabkan karena wilayah dataran tinggi cocok untuk pertanian yang ditunjang oleh pasokan air yang memadai serta suhu yang mendukung bagi pertumbuhan tanaman. Berbeda halnya dengan masyarakat yang tinggal di wilayah dataran rendah, umumnya jarang ditemui masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani karena tidak ditunjang oleh pasokan air serta suhu yang memadai. Berbeda lagi dengan masyarakat yang tinggal di daerah pantai, umumnya mereka bermata pencaharian sebagai nelayan (Purwanto T, Riski T, 2019).

Adapun Mata pencaharian masyarakat di bidang pertanian, meliputi : Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan. Sedangkan mata pencaharian penduduk di bidang non pertanian, meliputi : Perdagangan, Pertambangan, Perindustrian, Pariwisata dan Jasa (Londar, A., Rogi, O. H., & Tilaar, S. 2016). Adapun rujukan penelitian bisa dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Tabel Literatur Penelitian

No	Judul	Nama Mahasiswa	Universitas	Program Studi	Tahun	Metode	Hasil
1	Analisis Perubahan Tutupan Lahan DAS Citanduy Dengan Metode Penginderaan Jauh	Yekti, A., Sudarsono, B., & Subiyanto, S.	Universitas Diponegoro	Teknik Geodesi	2013	Penginderaan jarak jauh	Perubahan tutupan lahan di DAS Citanduy Tahun 1991-2003
2	Hubungan Perubahan Guna Lahan Dengan Limpasan Air Permukaan	Pontoh, N. K., & Sudrajat, D. J.			2005	Model regresi	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data yang berhasil diperoleh, maka dapat dibuktikan bahwa terdapat keterkaitan/ pengaruh antara tata guna lahan dan jumlah angkutan kota di kota Depok. Perubahan tata guna lahan dan penambahan jumlah penduduk dapat mempengaruhi penambahan jumlah angkutan umum.
3	Studi pengaruh perubahan tata guna lahan terhadap infrastruktur jaringan drainase kota rantepao	Meni Sriwati	Sekolah Tinggi Teknik Dharma Yadi Makasar	Teknik Sipil	2014	Metode pengumpulan data primer dan sekunder	Perubahan tata guna lahan di kawasan kota rantepao, sangat dipengaruhi oleh fungsi lahan dari kawasan persawahan, serta kebun menjadi kawasan permukiman sehingga berpengaruh pada pola sistem pemanfaatan. Perubahan tata guna

No	Judul	Nama Mahasiswa	Universitas	Program Studi	Tahun	Metode	Hasil
							<p>lahan permukiman tahun 2001 – 2004 sebesar 0,292 % dan tahun 2008 - 2009 sebesar 0,68% dari kecenderungan perubahan tersebut secara langsung mempengaruhi fungsi jaringan drainase akibat jumlah perubahan tata guna lahan.</p> <p>Perubahan tata guna lahan di kawasan kota rantepao telah berdampak pada meningkatnya debit banjir rencana (q) di kawasan tersebut. Dengan perubahan tata guna lahan tahun 2001 – 2009, memberikan kontribusi terhadap peningkatan debit banjir rencana yang relatif besar, sehingga fungsi drainase tidak mampu menampung debit banjir yang ada. Kondisi ini berdampak pada terjadinya genangan di kawasan kota rantepao.</p>
4	Analisis Perubahan Tata Guna Lahan Terhadap Koefisien Limpasan Kota Pekanbaru Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)	Putra, R. R.	Universitas Riau	Teknik Sipil	2016	Analisis SIG(System Informasi Grafis)	<ul style="list-style-type: none"> • Peta sebaran penduduk • Peta digitasi tata guna lahan • Perubahan guna lahan • Nilai koefisien limpasan berdasarkan wilayah pengembangan
5	Dampak	Sumaryoto	Universitas	Fakultas	2010		Menyimpulkan bahwa

No	Judul	Nama Mahasiswa	Universitas	Program Studi	Tahun	Metode	Hasil
	Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik, Sosial, Dan Ekonomi Lingkungannya		as Sebelas Maret	teknik			jalan tol tidak seharusnya berada di lokasi pertanian karena pertanian merupakan penopang ekonomi negara
6	Identifikasi Aspek Penyedia Lahan dan Mata Pencarian Dari Proses Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu	Siyasi Sulthan, V.	Universitas Komputer Indonesia	Perencanaan Wilayah Kota	2018	Pendekatan kuantitatif dan kualitatif	Memperoleh gambaran objek penelitian secara kualitas dan kuantitas
7	Identifikasi Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Jenis Mata Pencarian Masyarakat Di Kelurahan Purwawinangun (Kabupaten Kuningan)	Muhamad Sofyan, I. (2013)	Universitas Komputer Indonesia	Perencanaan Wilayah Kota	2013	Metode deskriptif kualitatif	Laih fungsi lahan dan mata pencarian di Kelurahan Purwawinangun, Kabupaten Kuningan.

Sumber :Hasil Analisis 2021

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian sebelumnya yaitu dapat mengetahui aspek perubahan tutupan lahan dengan jenis perubahannya beserta aspek sosial berkaitan dengan perubahan lahan yang berkaitan dengan masyarakat di lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang.